

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang Analisis Audit atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi diberikannya Opini Wajar Dengan Pengecualian pada LKPD Kota Kupang dikarenakan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan terhadap perundang-undangan, Kesesuaian dengan SAP, dan Kecukupan pengungkapan serta dalam pengawasan dan pengelolaan terhadap Aset Tetap yang belum memadai, Penatausahaan Aset Tetap yang belum tertib, belum optimalnya penggunaan Dana BOS serta belum menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
2. Berdasarkan analisis upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2019 yaitu dengan melakukan evaluasi dan pemantauan atas investasi jangka panjang serta melakukan SOP yang terbaru, melakukan rekonsiliasi Aset Tetap, merinci aset yang dicatat, serta menghitung ulang penyusutan Aset Tetap, dan untuk Dana BOS dilakukan pengawasan pada sekolah-sekolah yang menerima Dana BOS.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Badan Keuangan Daerah harus bekerja sama dengan instansi lainnya dalam memperbaiki pengelolaan Aset Tetap agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.
2. Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap Dana BOS agar pengelolaan Dana BOS lebih efektif dan melaksanakan rekomendasi perbaikan dalam penatausahaan Dana BOS.
3. Pemerintah Daerah Kota Kupang harus menindaklanjuti temuan-temuan yang masih menjadi rekomendasi dari BPK agar di tahun-tahun berikutnya tidak lagi menjadi masalah.
4. Bagi peneliti yang akan mengambil judul yang sama, diharapkan bisa lebih rinci dalam menjelaskan masalah yang terjadi di tahun yang bersangkutan sehingga berguna bagi teman-teman yang akan meneliti dengan judul yang sama di tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat
- Arens, Elder dan Beasley. 2011. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Salemba Empat
- Arifin, Nugroho Rifky. 2018. *Analisis Opini BPK Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010-2016*. Artikel Penelitian: Universitas Gadjah Mada
- Bastian, Indra. 2013. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Penerbit: Salemba Empat
- Elsa Trisnawati. 2017. *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014-2016)*
- Irwanto Rante, Agustinus Salle, Elsyhan R. Marlisa. 2014. *Analisis Terhadap Pemberian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang*
- Kieso, dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Penerbit: Salemba Empat
- Lalu Riza Ihwandi. 2016. *Analisis Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- LHP- LKPD Kota Kupang Tahun Anggaran 2016 <http://www.Kupang.bpk.go.id>
- LHP- LKPD Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 <http://www.Kupang.bpk.go.id>
- LHP- LKPD Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 <http://www.Kupang.bpk.go.id>
- LHP- LKPD Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 <http://www.Kupang.bpk.go.id>
- Lili M. Sadeli. 2018. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Cetakan ke-12. Bumi Aksara
- Mulyadi. 2011. *Auditing Buku I*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Sofyan S. Harahap. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Penerbit: Rajawali Pers

Sri Yunawati. 2015. *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*

-----, 2003. *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

-----, 2004. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

<https://penatimor.com/2018/11/28/masalah-aset-penyebab-kota-kupang-gagal-raih-wtp/> ( Diakses tanggal 04 Maret 2020)